

---

*Analysis Achievement Unqualified Opinion Process of East Tanjung Jabung Regency (Period 2015-2018)***Analisa Proses Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Periode 2015 -2018)****Oleh:****Fadhilah Sari <sup>1\*)</sup>, Ahmad Hizazi <sup>2\*)</sup>, Yudi <sup>3)</sup>**<sup>1)</sup> *Alumni Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi Tahun 2020, Jambi – Indonesia*<sup>2&3)</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia*Email: [fadhilahsari@gmail.com](mailto:fadhilahsari@gmail.com)<sup>1)</sup> [hizazi@unja.ac.id](mailto:hizazi@unja.ac.id)<sup>2)</sup> [yudi\\_fe@unja.ac.id](mailto:yudi_fe@unja.ac.id)<sup>3)</sup>*\* Korespondensi & Translator*

---

**RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk: 08 Agustus 2024

Artikel Diterima: 04 November 2024

---

**ABSTRACT**

*This research aims to identify the factors in the achievement of unqualified opinion, and efforts to maintain the unqualified opinion of East Tanjung Jabung Regency's Financial Report, because East Tanjung Jabung Regency was able to reach the unqualified opinion in 2017 and maintain it in 2018 after the year 2015 and 2016 that the opinion achieved only Qualified Opinion (WDP). This research is a qualitative research and data for the research were collected by means of interviews, observations and documentation. This research uses NVIVO 12 Plus qualitative data analysis tool software with Kappa reliability test. The research result shows that the factors that support East Tanjung Jabung Regency to achieve unqualified opinion were: coordination among work units, fair presentation of financial report, audit process, leadership's commitment, follow up on the recommendation of BPK, reviews by the Inspectorate, coaching to the financial and assets managers and giving sanctions to the SKPD (local government work unit) that has financial abuse and a reward if it is able to achieve the unqualified opinion and maintain it. Whereas the efforts performed by East Tanjung Jabung Regency are: creating new procedures, improving infrastructure and human resources, increasing monitoring activities in terms of responsibility report and conducting periodic data on the SKPD's financial statements.*

**Keywords:** *Unqualified Opinion, local government financial report, East Tanjung Jabung Regency Government.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor perolehan opini WTP serta upaya untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur mampu meraih Opini WTP pada Tahun 2017 dan mempertahankannya di 2018 setelah pada tahun 2015 dan tahun 2016 opini yang diraih hanya WDP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan software alat analisis data kualitatif NVIVO 12 Plus dengan uji realibilitas Kappa menggunakan NVIVO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh opini WTP yakni koordinasi antar unit kerja, penyajian laporan keuangan yang wajar, proses audit, komitmen pimpinan, melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, review oleh Inspektorat, komitmen pimpinan, pembinaan kepada pengelola keuangan dan aset serta pemberian sanksi kepada SKPD yang memiliki temuan serta adanya reward jika mampu meraih opini WTP dan mempertahankannya. Adapun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni meningkatkan kegiatan monitoring terkait SPJ, membuat prosedur-prosedur baru, meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya manusia, melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan SKPD secara berkala.

**Kata kunci:** Opini wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan pemeriksa keuangan memiliki wewenang untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Opini yang diberikan BPK atas kewajaran laporan keuangan pemerintah terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini audit selalu menjadi indikator penilaian untuk LKPD dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang selalu diinginkan oleh pemerintah daerah karena opini ini selain sebagai prestasi juga sebagai indikator baiknya pengelolaan keuangan suatu daerah.

Opini LKPD pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri pada kurun waktu dua tahun yakni tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Prestasi yang sangat membanggakan, namun hal ini tidak diraih dengan mudah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ikhtisar semester I 2019 terlihat bahwa dua tahun berturut-turut yakni tahun 2015 dan 2016 hanya mampu memperoleh opini WDP, dimana terdapat temuan-temuan material yang menjadi pengecualian. Temuan didominasi temuan aset tetap, baik aset yang tidak diketahui keberadaannya, rusak berat. Nilai temuan yang material menjadi penyebab utama jatuhnya perolehan opini pada dua tahun anggaran secara berturut-turut. Walaupun terlihat adanya langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait temuan tahun sebelumnya, namun hanya fokus pada akun yang menjadi temuan saja, tidak menyeluruh pada seluruh rincian akun aset tetap, hal ini sesuai dengan penelitian oleh Sougi. T (2018) "Individu pemegang kekuasaan pengelolaan aset mulai dari sekretaris daerah, pengurus barang dan inspektur pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pengendali internal telah lalai menjalankan tugasnya".

Pada LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 Dana BOS turut andil menjadi hal yang mengganjal perolehan opini tertinggi Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nihilnya pencatatan Dana BOS pada LKPD menjadi penyebab utama. Proses transfer dana BOS yang tidak melalui rekening kas daerah melainkan langsung ke rekening sekolah menjadi alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak mencatat realisasi pendapatan dan penggunaan dana BOS pada LKPD tahun anggaran 2015, hal ini tidak sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) nomor 02 tentang pendapatan yang diterima langsung oleh entitas pemerintah lainnya yang

menyatakan bahwa pendapatan kas, antara lain BOS yang diterima oleh sekolah dari provinsi, jamkesmas yang diterima oleh SKPD rumah sakit dari kementerian kesehatan yang diterima satker dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk disahkan/diakui pendapatan negara/daerah.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2016, temuan BOS kembali berulang hanya saja tidak lagi dengan temuan yang sama namun lebih kepada proses pencatatan yang tidak tepat. Penyajian pendapatan dan beban pada laporan operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak diyakini kewajarannya oleh tim pemeriksa BPK. Dua tahun berturut-turut manajemen pengelolaan pencatatan dana BOS menjadi sandungan masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam perolehan opini wajar tanpa pengecualian (Laporan pokok-pokok temuan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016). Namun pada tahun anggaran 2017 walaupun masih terdapat temuan aset tetap, menurut pendapat BPK jumlahnya tidak material sehingga tidak menjadi pengecualian. Pada tahun anggaran 2017 opini WTP dapat diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perolehan opini WTP kembali diraih pada tahun anggaran 2018, temuan tetap ada namun nilai temuan dianggap tidak material sehingga opini wajar tanpa pengecualian dapat dipertahankan (Laporan pokok-pokok temuan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018).

Opini wajar tanpa pengecualian bukan sekedar label penghargaan tanpa makna. Layaknya prestasi yang kerap disandingkan dengan reward begitupun perolehan opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan reward kepada pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik salah satu pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang baik adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian, reward yang didapat adalah diberikan alokasi tambahan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) yang dalam PMK No 50/pmk.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh DID sebesar Rp. 10.148.609.000 (Sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) sungguh nilai yang tidak bisa dianggap kecil. Reward berupa

penambahan Dana Insentif Daerah hanyalah salah satu hal yang menjadi motivasi daerah untuk berlomba-lomba memperoleh predikat tertinggi dalam proses pemeriksaan LKPD. Hal lain yang mendasari keinginan kuat daerah untuk perolehan opini WTP adalah ambisi dan komitmen Pimpinan Daerah selama beliau menjabat hal ini tertuang pada Penelitian terdahulu oleh Teri, dkk (2017).

Dari pemaparan di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas dalam penyajian LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilihat dari pencapaian opini WTP dua tahun berturut turut. Penelitian terkait analisa proses pencapaian opini WTP pernah di lakukan oleh Agnes Kidi Beda Mudamakin (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung perolehan opini pada kabupaten Sumba Timur yakni melakukan tindak lanjut atas temuan BPK, reviu inspektorat, komitmen pimpinan dan koordinasi unit kerja. Namun dalam penelitiannya terdapat keterbatasan diantaranya tidak dicantumkan peranan pimpinan tertinggi, tidak melakukan wawancara dengan pihak auditor dalam hal ini adalah BPK, serta tidak mengetahui dengan pasti proses audit yang dilakukan BPK, dikarenakan peneliti hanya memperoleh data satu arah yakni dari pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur).

Hal ini lah yang menarik peneliti ingin menganalisa proses pencapaian opini wajar tanpa pengecualian pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rentang tahun yang dipilih peneliti antara 2015 s.d 2018 untuk menyajikan secara komparatif dan terstruktur, Peneliti ingin menganalisa permasalahan temuan yang dapat diselesaikan tahun pertahun dengan progres tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Hingga perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan dua tahun berturut-turut dan keterbatasan dari penelitian sebelumnya dapat peneliti tuangkan dalam penelitian ini.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

- Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- Bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian?
- Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memaknai opini WTP yang telah diraih?

### 1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

- Bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam

mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mempertahankan opini WTP ditahun-tahun selanjutnya.

- Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh serta mempertahankan opini WTP.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERMUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1 Kriteria Opini BPK

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada empat jenis pendapat yang diberikan BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP adalah capaian opini tertinggi yang sangat diharapkan setiap pemerintah daerah karena opini WTP dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik.

### 2.2 Peran Pemerintah Daerah

Desentralisasi dalam pemerintahan mengharuskan setiap daerah mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah reformasi manajemen keuangan daerah. pemerintah telah menetapkan 1 paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan. Untuk terciptanya keseragaman dalam penyusunan Laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain peran sentral Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi

penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

### 2.3 Pemaknaan Opini atas Laporan Keuangan

Pembahasan Mengenai opini telah banyak diteliti oleh para akademisi. Dalam (Vivin dkk : 2013) menemukan adanya perbedaan persepsi antara auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan dengan stakeholder (masyarakat). Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerimaan (tanggapan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca indera. Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera (mendengar, melihat, mencium, menyentuh dan merasakan).

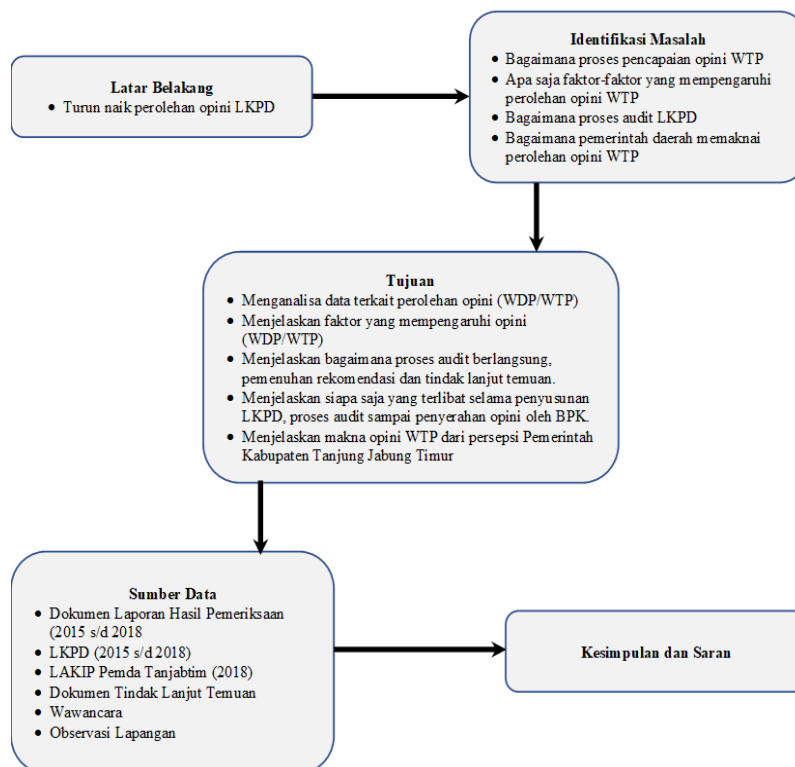
Dalam (Walgito: 2004) individu dapat menyadari atau membuat persepsi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni pertama terdapat obyek yang akan dipersepsikan (fisik), kedua adanya alat indera sebagai penerima stimulus (fisiologis) dan ketiga adanya perhatian yang merupakan langkah penting dalam persepsi (psikologis). Melihat beberapa pengertian di atas, erat kaitannya persepsi dengan pemaknaan yang dilakukan seseorang atau individu. Dalam hal ini, makna berhubungan dengan bagaimana individu menilai sesuatu melalui apa yang mereka persepsikan. Oleh

karena itu dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan makna yang dipahami oleh pemerintah Kabupaten tanjung jabung timur baik dari sisi penyaji laporan keuangan, pengawasan internal laporan keuangan yakni inspektorat dan dari pengawas eksternal BPK mengenai opini WTP yang telah diraih.

### 2.4 Kerangka Pemikiran

Kabupaten Tanjung Jabung Timur melewati banyak proses dalam mencapai opini tertinggi dari BPK tersebut. Adanya temuan berulang menjadi penyebab opini WTP tidak mampu diraih pada tahun 2016 (LHP BPK Tahun 2016). Opini WTP dapat diraih kembali pada tahun 2017 (LHP BPK 2017) dan dipertahankan pada tahun 2018 (LHP BPK 2018) Tindak lanjut dan pemenuhan rekomendasi BPK atas temuan tahun sebelumnya memberikan peranan penting terhadap perbaikan tata kelola keuangan.

Proses pencapaian opini WTP menjadi hal menarik yang ingin diteliti. Penelitian ini mengambil data perolehan opini dari tahun 2015 s.d 2018. Selain telaah dokumen yang terkait, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap informan penelitian yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah sampai dengan penyerahan Opini. Tujuannya untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan opini WTP, menganalisa bagaimana proses tata kelola keuangan pemerintah daerah, pemenuhan rekomendasi BPK dan tindak lanjut temuan. Kerangka pemikiran dalam penelitian disajikan dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dengan jelas bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Terdapat banyak alasan yang shahih peneliti memilih metode penelitian kualitatif, salah satunya adalah kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman (Straus dan corbin 2003:5). Case study research (CSR) dipilih sebagai desain penelitian pada penelitian ini yaitu mencoba mempelajari suatu fenomena dalam kasus dan dalam konteks yang nyata. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara mendalam seluruh fenomena yang merupakan siklus dari fokus yang diteliti guna membangun generalisasi yang lebih luas. CSR bertujuan memahami dinamika yang ada dalam sebuah atau beberapa setting tertentu (Kamayanti 2017:75).

#### 3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Pemilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pencapaian perolehan opini WTP setelah dua tahun sebelumnya opini yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih WDP (IHPS Semester I BPK Tahun 2019). Objek dalam penelitian kualitatif adalah topik permasalahan yang diteliti dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada analisa proses pencapaian opini WTP pada

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat dalam proses pencapaian opini WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai objek yang diaudit BPK, pada akhirnya tidak serta merta disusun oleh satu pihak, banyak pihak yang ikut andil dalam proses penyusunannya. Maka dari itu informan penelitian ini meliputi :Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai entitas penyusun laporan keuangan, Dinas Pendidikan dengan temuan BOS yang berulang, Inspektorat sebagai auditor internal dan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Jambi selaku auditor eksternal.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian atau instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri ia menjadi instrument utama (key Instrument).

Fokus pada penelitian ini adalah analisa proses pencapaian opini WTP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumen. Menurut Moleong (2018) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

#### 3.4. Teknik Analisa Data

Hal yang menjadi pembeda antara penelitian kualitatif yang satu dengan penelitian kualitatif lainnya terletak pada Teknik Analisa data (Kamayanti, 2017 : 68). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis content* yaitu teknik analisa yang digunakan untuk menganalisis, memahami informasi berupa teks. Ciri tambahan dari teknik analisa konten adalah adanya keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang pendekatan terhadap data tersebut serta Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik. Patrick, Burke, dkk., dalam (Bandur Agustinus : 2019) membagi tahapan analisa data kualitatif menjadi 3 tahapan yakni: *Open coding*, *Axial coding*, *Selective coding*. Analisa data dilaksanakan secara manual dan terkomputerisasi menggunakan *software* (perangkat lunak) NVIVO 12 Plus.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada akhir tahun pelaporan pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran untuk kemudian dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianggap baik jika opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD berupa opini, temuan dan rekomendasi. Opini yang diberikan BPK berdasarkan atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan BPK atas LKPD yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Selanjutnya perolehan opini WTP merupakan perolehan predikat tertinggi yang berarti kewajaran informasi suatu laporan keuangan telah dinyatakan lengkap, transparan dan akuntabel. Pencapaian opini WTP oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur merupakan pencapaian yang didukung faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Opini WTP jelas bukan hanya sekedar pencapaian tanpa makna. Pemaknaan opini WTP dari persepsi informan menunjukkan bahwa selain beban yang besar namun opini WTP merupakan tanggung jawab pekerjaan dan menjadi cerminan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik.

## 4.2. Faktor-faktor yang Mendukung Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh opini WTP pada tahun 2017 dan 2018.

### 4.2.1 Koordinasi Antar Unit Kerja

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada suatu pemerintah membutuhkan peran dari berbagai pihak dalam hal ini bupati, Inspektorat selaku auditor pengawas internal, Badan Keuangan Daerah selaku unit yang menyusun laporan keuangan, dan SKPD-SKPD yang terdapat di wilayah pemerintahan tersebut. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan yang diperoleh saat melakukan wawancara sebagai berikut:

*“kita butuh kerja sama, team work antara unit kerja perencanaan, unit kerja penatausahaan, unit kerja pengawasan, ini harus sejalan, sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud, khususnya kaitan dengan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel tadi. Inilah yang kita benahi dari tahun ke tahun, dimana tahun 2017 dan 2018 opini WTP telah kita peroleh. berkat kerja tim antar dinas teknis, badan pengawas dalam hal ini inspektorat kabupaten maupun Badan Keuangan selaku penatausahaan keuangannya.” (NSW, Kepala badan pada Badan Keuangan Daerah)*

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terkait koordinasi antar entitas dalam Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam proses perolehan opini WTP dilakukan secara berkala, baik sebelum proses penyusunan LKPD maupun sesudah penyusunan LKPD.

### 4.2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Melalui wawancara informan, observasi dan telaah dokumen yang dilakukan peneliti, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 tidak menyajikan data laporan penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tim manajemen BOS yang menyatakan bahwa:

*“Dikarenakan juknis belum detail terkait dana BOS harus masuk kedalam struktur APBD kemudian masih lemahnya pengetahuan dan pemahaman tim BOS kabupaten tentang sistem pelaporan Dana BOS dan Pihak sekolah tidak sepenuhnya menyerahkan laporan setiap bulannya sehingga menyulitkan tim BOS kabupaten untuk merekap penerimaan dan realisasi dari sekolah dan akhirnya laporan menjadi tidak valid dan tidak sinkron sehingga pada akhirnya tidak bisa dituangkan dalam laporan keuangan pemda pada saat itu” (MNR, anggota Manajemen BOS Pada Dinas Pendidikan)*

Akibat hal ini BPK kesulitan menelusuri data dikarenakan minimnya informasi. Peneliti menkonfirmasi hal ini kepada ketua tim pemeriksa LKPD, auditor BPK

*“Contohnya dana BOS, dari prosedur yang kami lakukan harusnya lengkap ada rinciannya, kebetulan kemarin itu lho kok gelondongan, mana rinciannya? kita tunggu dengan memberikan waktu pada pemeriksaan pendahuluan kita beri waktu kepada pemda untuk merinci itu ngga terinci juga kan. tetap aja di auditednya gelondongan juga” (MRY, Ketua Tim Pemeriksa pada BPK)*

Hal ini menyumbangkan opini WDP pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pengecualian dana BOS. Kembali terulang pada tahun 2016 penyajian data dana BOS pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat itu tidak mampu menyajikan beban belanja secara rinci hanya gelondongan saja dengan akun ‘beban dana BOS’, ini terlihat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 tidak dirinci. Setelah dua tahun berturut-turut perolehan opini WDP sejak 2015 dan 2016 dimana temuan dana BOS menjadi masalah utama, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serius membenahi penyajian seluruh data dana BOS di LKPD. Hasil wawancara dengan manajemen BOS menunjukkan beberapa hal perbaikan yang dilakukan

*“Dinas Pendidikan membentuk tim BOS baru dengan merekrut personil yang memahami tentang pelaporan keuangan. Tim pengelola dana BOS kabupaten memberikan bimbingan dan arahan terkait penganggaran dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS dalam APBD kami juga melakukan sosialisasi dan memandu penyusunan RKAS dan laporan beban belanja selama 4 kali dalam setahun. Verifikasi langsung dilakukan face to face dengan kepala sekolah per triwulan. Koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah selaku penyusun laporan keuangan kabupaten berjalan dengan baik, adanya keseragaman format pelaporan untuk seluruh sekolah yang ditetapkan manajemen BOS” (MNR, anggota manajemen BOS)*

Terbitnya Keputusan Bupati Nomor 253 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Dana Bantuan Operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendidikan, memperkuat aturan tentang tata kelola penyajian dana BOS. Penyajian akun yang sesuai dan terinci pada laporan keuangan sangat berpengaruh pada perolehan Opini. Salah satu hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD adalah kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, ketidaksesuaian penyajian membuat kewajaran laporan keuangan dipertanyakan. Langkah-langkah perbaikan yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan hasil yang baik pula terhadap perolehan opini LKPD

#### 4.2.3 Komitmen Pimpinan

Setiap kegiatan pemerintahan dalam menggapai tujuan memerlukan dukungan dari pimpinan. Keadaan ini pula yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni dukungan dari kepala daerah dan pimpinan SKPD menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan pemerintah yaitu salah satunya memperoleh opini WTP. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara sebagai berikut

*“Dukungan kepala daerah terhadap proses perolehan opini WTP penuh sebenarnya, beliau komit membackup apa-apa yang menjadi persoalan. Mulai dari penganggaran sudah aktif, perencanaan sampai dengan pelaporan, beliau sangat interest.”* (NSW, Kepala Bidang Keuangan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat disimpulkan bahwa dukungan dan komitmen bupati memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni salah satunya dengan adanya perjanjian kinerja antara Kepala Badan Keuangan Daerah dengan Bupati selaku kepala daerah dimana perolehan opini WTP menjadi perjanjian kinerja yang harus dipenuhi. Dengan opini WTP kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari sisi akuntabilitas, transparan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (LAKIP Bakeuda 2018).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Teri dkk (2017), ambisi dan komitmen Pimpinan Daerah untuk mendapatkan opini WTP atas LKPD selama beliau menjabat sangat tinggi. Dalam hal ini, komitmen dan ambisi Bupati Tanjung Jabung Timur dijelaskan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan adanya komitmen dari bupati untuk membackup seluruh persoalan terkait proses penyusunan dan audit atas LKPD.

#### 4.2.4 Tindak lanjut temuan pemeriksaan LKPD

Proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya pada SKPD yang memiliki temuan. Selanjutnya, proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan memiliki batasan waktu yaitu 60 (enam puluh) hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penyelesaian terkait temuan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala bidang aset dan auditor internal inspektorat, sebagai berikut

*“Inspektorat cukup berperan dalam temuan aset, karena ada tindak lanjut dari inspektorat terhadap temuan yang harus ditindak lanjuti oleh SKPD apakah telah sesuai rencana aksi atau tidak. setelah itu tindak lanjut diverifikasi dan dan divalidasi untuk kemudian dikoordinasikan ke Tim Pemeriksa BPK”*

*(HRT, Kabid aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*

*“Ini tugas bidang analisis dan evaluasi untuk melakukan tindak lanjut ke SKPD. disitu kan kita diminta untuk melakukan tindak lanjut dalam 60 hari sejak LHP keluar. LHP disadur dalam surat pemberitahuan ke SKPD itu lah langkah awal proses tindak lanjut. Setelah itu ada surat teguran untuk SKPD-SKPD terkait temuan. BPK minta temuan administrasi harus segera kita tindaklanjuti, apalagi temuan yang mempengaruhi opini kami sangat cepat untuk melakukan proses tindak lanjutnya. kalau kami kesulitan sekali terhadap tindak lanjut kami bentuk tim dengan tim TPTGR”* (NRM, Auditor internal pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Tindak lanjut atas temuan didasarkan atas rencana aksi (*action plan*) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua tim pemeriksa auditor BPK

*“Hasil temuan BPK harus ditindaklanjuti oleh inspektorat dan itu kami pantau perkembangannya setiap semester, untuk melihat hasil dari action plan”*

Pernyataan ini juga didukung dengan adanya rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas temuan dan rekomendasi dari BPK serta target IKU (Indikator Kinerja Utama) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menunjukkan bahwa ada peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Pada tahun 2015 sebesar 72%, menjadi 92% pada tahun 2016 kemudian menjadi 94% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 95 % pada tahun 2018 (LAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

#### 4.2.5 Reviu LKPD oleh Inspektorat

Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur peran Inspektorat untuk melakukan reviu atas LKPD telah dilakukan. Namun, tidak dilakukan secara rinci dan mendetail dikarenakan keterbatasan personil dan banyaknya ragam pekerjaan pengawasan oleh Inspektorat selaku auditor internal pemerintah daerah. Hal ini di dukung hasil wawancara sebagai berikut

*“Ada reviu, pemantauan dan evaluasi. bukan cuma laporan keuangan. ada reviu RKA, RKPD, DAK. untuk monitoring juga banyak dana BOS misalnya. Sebanyak itulah pemeriksaan kami dengan SDM auditor terbatas makanya reviu LK secara mendetail kami tidak bisa tapi kami topang dengan pemeriksaan lain yang mendukung seperti pemeriksaan terkait monitoring berkala”* (NRM, auditor internal Inspektorat).

Laporan hasil revidi merupakan dokumen pendukung LKPD unaudit ketika diserahkan ke BPK, tanpa laporan hasil revidi LKPD unaudit tidak akan diterima oleh BPK. Namun dalam prosesnya memang diharapkan ada perbaikan, dari hasil observasi lapangan dan wawancara informan, peneliti melihat proses revidi memang belum optimal namun inspektorat sudah melakukan upaya mendukung proses revidi dengan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala. Keterbatasan personil dan beragamnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat pun menjadi kendala.

#### 4.2.6 Melakukan pembinaan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui unit kerja pengawasan yakni inspektorat rutin melakukan pembinaan terhadap SKPD yang memiliki temuan material terkait perolehan opini. Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur tersandung persoalan pengelolaan Dana BOS sehingga inspektorat turun tangan lebih intensif dengan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“pembinaan dan pengawasan kami kepada SKPD (Dinas Pendidikan) itu diharapkan dapat mempengaruhi mereka dalam proses pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih baik. sehingga pada saat pemeriksaan BPK laporan mereka sudah baik. fungsi kami lebih ke early warning system” (NRM, Auditor Inspektorat)*

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan anggota manajemen BOS diketahui pembinaan yang dilakukan Inspektorat sangat mendetail terkait pengelolaan dana BOS. Secara acak, sekolah-sekolah dijadikan sampel untuk dilaksanakan pembinaan dari Inspektorat. Hal ini menunjukkan faktor pembinaan dapat mendukung perolehan opini WTP dengan terbukti pada tahun 2017 dan 2018 tidak lagi terdapat temuan terkait dana BOS dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD.

#### 4.2.7 Sanksi dan Reward

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat serius menyikapi SKPD yang menjadi temuan pengecualian. Pada Tahun 2015 dan 2016 pengelolaan dana BOS menjadi sandungan perolehan opini WTP. Tahun pertama temuan BOS, Kepala Daerah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas pengelolaan dana BOS, namun temuan dana BOS kembali terulang sehingga sanksi diberikan atas kejadian tersebut. Ketua tim manajemen BOS tidak lagi menjabat sebagai ketua manajemen BOS dan diberikan sanksi tidak menjabat jabatan struktural pada Dinas Pendidikan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan anggota manajemen BOS pada saat peneliti menanyakan terkait sanksi yang diterima ketika dana BOS menjadi temuan material yang mempengaruhi opini sebagai berikut:

*“Apo itu harus disebut yo? (tertawa khawatir) Pak SM (Ketua Manajemen BOS) itu eselon IV dimutasi ke kecamatan tapi non job, tapi aku dak tau jugo apo karno itu atau idak, kami tim manajemen dana BOS mendapat teguran tertulis dan semua kepala sekolah juga mendapat teguran tertulis” (MNR, Anggota Manajemen BOS)*

Selain sanksi yang diterima atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya opini atas LKPD. Faktor reward merupakan salah satu hal yang mempengaruhi proses perolehan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Reward diberikan sebagai stimulasi untuk semua yang terlibat dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memberikan reward atas perolehan opini WTP yang diraih tahun 2017 dan 2018. Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan, menganggarkan insentif kepada tim manajemen BOS. Hal ini dinyatakan oleh informan sebagai berikut

*“Alhamdulillah ada reward isentif bagi kami tim manajemen BOS berupa honorarium” (MNR, anggota tim manajemen BOS)*

Selain reward pemerintah daerah kepada entitas yang terlibat di dalam proses pencapaian Opini WTP. Pemerintah pusat juga memberikan reward kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena telah melakukan pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang baik dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2017 dan 2018, reward yang didapat adalah diberikan alokasi tambahan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID). Peneliti menerima informasi dari kepala badan keuangan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjelaskan bahwa:

*“Salah satu reward pemerintah pusat untuk opini WTP yang kita raih tahun 2017 kita mendapatkan Dana insentif Daerah yang dianggarkan pada APBD 2019” (NSW, Kepala Badan Keuangan)*

### 4.3. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mempertahankan Opini WTP

Tahun 2018 opini WTP masih dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada saat penelitian ini dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang dalam masa audit LKPD tahun anggaran 2019. Oleh karena itu peneliti mencari informasi terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Tanjung Jabung Timur pada tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh beberapa hal yakni sebagai berikut

#### 4.3.1 Membuat Prosedur dan Kebijakan Baru

Membuat prosedur dan kebijakan baru selama tidak bertolak belakang dengan dengan peraturan yang ada baik peraturan dari pemerintah pusat maupun



pemerintah daerah atau bahkan mendukung peraturan yang sudah ada merupakan hal baik dalam peningkatan kualitas kegiatan pemerintahan. Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini dilakukan dalam upaya mempertahankan opini WTP LKPD yang telah diraih. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

*“contohnya ketika temuan aset tidak diketahui keberadaannya dan menjadi sandungan perolehan opini, kami melakukan inventarisasi dengan sensus aset” (HRT, Kepala Bidang Aset)*

Terbitnya Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah, kebijakan terkait sensus BMD dapat dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki opini yang diperoleh pada tahun 2015 dan 2016 pada saat itu yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) pada tahun 2017. Kebijakan-kebijakan yang mendukung keefektifan kegiatan pemerintah terkait proses pencapaian dan mempertahankan opini WTP juga dilakukan Dinas Pendidikan dalam tata kelola dana BOS. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

*“Kami bikin kebijakan baru, kami melakukan verifikasi face to face ke kepala sekolah setiap triwulannya dan kami membuat prosedur penyeragaman laporan seluruh sekolah sekolah” (MNR, Anggota manajemen BOS)*

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa prosedur yang ditetapkan dalam rangka mengefektifkan fungsi dalam pemerintahan dengan harapan kendala-kendala di tahun sebelumnya dapat diatasi.

#### 4.3.2 Rekonsiliasi dan Monitoring data terkait LKPD

Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar valid. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari hasil wawancara sebagai berikut

*“Kami secara berkala rutin melakukan rekonsiliasi aset dengan pengurus barang SKPD” (HRT, Kepala Bidang Aset)*

Terkait pernyataan tersebut diatas didukung dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset yang menunjukkan pencatatan aset dan persediaan di SKPD di pastikan sama dengan pencatatan aset dan persediaan di Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Hasil observasi lapangan juga melihat bahwa rekonsiliasi tidak hanya dari sisi pencatatan aset namun juga dari penerimaan, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan belanja SKPD. Hal ini didukung dengan tersampainya berita acara rekonsiliasi pada sub bagian akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah. Dengan rutin melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu

Monitoring dalam hal ini terkait dengan monitoring SPJ. Dalam wawancara dengan anggota manajemen

BOS hal ini turut dibenarkan dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Monitoring pekerjaan terkait pengelolaan dana BOS secara berkala dilakukan pimpinan kepada seluruh manajemen BOS” (MNR, anggota manajemen BOS)*

Monitoring dalam upaya mempertahankan opini WTP juga dilakukan Inspektorat dan Badan keuangan daerah dimana dua entitas ini sangat erat kaitannya dengan LKPD dimana Inspektorat sebagai pengawas dan Badan Keuangan Daerah sebagai entitas penyusun LKPD. Hasil wawancara dengan kepala Badan keuangan terkait upaya apa yang akan dilakukan dalam mempertahankan opini yang telah diraih dinyatakan sebagai berikut:

*“Mungkin secara umum ya, tidak secara teknis. Saya selalu memonitor mengkoordinir setiap proses baik itu menghimpun dokumen, koordinasi dengan SKPD. Itu tugas pokok saya, untuk teknisnya 289iker289i kepada yang membidangi. Kedepannya kami akan tetap konsisten berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan dinas-dinas teknis, saya 289iker itu sudah cukup.” (NSW, Kepala Badan Keuangan Daerah)*

Sedangkan Inspektorat berharap dengan kegiatan monitoring pengawasan yang mereka lakukan akan memberikan imbas positif ke pelaporan keuangan SKPD, sehingga pada saat pemeriksaan oleh BPK, SKPD dapat menyajikan laporan yang akurat. Hal ini dukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

*“Pengawasan kami kepada SKPD itu diharapkan dapat mempengaruhi mereka dalam proses pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih baik. Sehingga pada saat pemeriksaan BPK laporan mereka sudah baik.” (NRM, Auditor Inspektorat)*

#### 4.3.3 Dukungan Sarana Prasarana serta peningkatan Kapasitas SDM

Kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif tidak hanya didukung sumber daya manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan tersebut tetapi juga dari sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut. Pemenuhan sarana dan prasarana akan membantu setiap unit kerja dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pemerintahan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terkait sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Tanjung Jabung Timur dalam mendukung kegiatan SKPD terkait proses pencapaian opini WTP sudah cukup memadai, seperti kendaraan dinas Inspektorat dalam kegiatan pengawasan, laptop dan komputer lengkap dengan printer pada masing-masing tim penyusun laporan keuangan dan penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang bisa diakses melalui web browser oleh seluruh SKPD, sehingga proses perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tersistem.

Sumber Daya manusia yang berkualitas dalam suatu pemerintahan dapat menunjang kegiatan

pemerintahan. Dalam hal upaya mempertahankan opini WTP LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan optimalisasi peningkatan kualitas SDM dengan bimbingan teknis dan diklat-diklat. Optimalisasi dilakukan karena kompetensi SDM pada Inspektorat, Bidang Aset dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan masih sangat kurang. Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 1 orang kepala sub bidang dengan latar pendidikan sarjana akuntansi, dua orang staf dengan status pegawai negeri bukan dengan latar pendidikan akuntansi ditambah 2 orang staf honorer, total hanya 5 orang yang mengkoordinir 43 SKPD, selain kurangnya jumlah personil sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM pada Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kepala Badan keuangan dalam wawancara peneliti terkait peningkatan SDM mengatakan pemerintah daerah telah menganggarkan bimtek pengelolaan keuangan. Pernyataannya termuat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kita dimungkinkan untuk menganggarkan kebutuhan peningkatan SDM, SDM Bidang Keuangan misal bintek dan peningkatan sarana dan prasarana.” (NSW Kepala Badan Keuangan Daerah)*

#### 4.4 Makna Pencapaian Opini WTP

Setiap pemerintah pusat/daerah berusaha untuk mencapai opini WTP karena dianggap opini dengan predikat paling baik dibandingkan opini lainnya serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. Walaupun dalam proses pencapaiannya tidaklah mudah, Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

*“opini WTP tentu hal yang sangat kami harapkan karena mencerminkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Walaupun cukup menjadi beban bagi kami Bidang Aset dimana temuan aset kerap menjadi kendala namun kami sikapi dengan tanggung jawab ” (HRT, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*

Selain itu pentingnya opini WTP didukung juga dengan hasil wawancara berikut:

*“ Opini WTP itu salah satunya menggambarkan penyajian laporan keuangan yang sudah benar, yang otomatis ini merupakan akuntabilitas mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban, selarasilah.” (NSW, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*

*“ pencapaian opini WTP adalah bagian dari renstra Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat penting artinya bagi pemda.” (NRM, Auditor*

*internal pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*

Temuan pemeriksaan BPK erat kaitannya dengan perolehan opini LKPD. Temuan material kerap menjadi sandungan pemerintah daerah. Dalam wawancara dengan ketua tim auditor BPK beliau menjelaskan:

*“Ya sebagai tim kita tentu melihat temuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi opini tugas kita menguji lagi temuan tersebut. karena kalau temuannya ternyata masih signifikan ya itu akan mempengaruhi opini tahun berikutnya.” (MRY, Ketua Tim Pemeriksa pada BPK)*

Adapun dari hasil wawancara dari beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini maka terdapat beberapa poin yang diperoleh peneliti diantaranya:

1. Tercapainya opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa ada perbaikan pengelolaan keuangan serta tindak lanjut atas temuan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada LHP tahun 2017 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi temuan-temuan pada tahun sebelumnya pada LKPD tahun 2016 serta dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menindaklanjuti temuan di tahun 2015.
2. Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tercapainya prinsip good governance yakni akuntabel dalam menyusun laporan keuangan yang didukung dengan dokumen-dokumen yang dapat ditelusuri serta ketepatan waktu pelaporan
3. Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern
4. Opini WTP yang diperoleh tidak menyatakan bahwa pemerintah tersebut tidak memiliki masalah atau temuan, hal ini pun terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat beberapa temuan namun temuan-temuan tersebut bukan merupakan hal yang material dan menimbulkan kerugian negara.
5. Walaupun opini WTP dimaknai sebagai beban namun lebih disikapi sebagai tanggung jawab.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mendukung perolehan opini WTP pada pemerintah tanjung jabung timur yaitu, koordinasi antar entitas untuk memperlancar proses penyusunan LKPD, penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dan terinci, pemenuhan rekomendasi BPK terhadap temuan

LKPD, melakukan revidi LKPD, dan proses selama masa audit LKPD oleh BPK, Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pencapaian opini WTP, pemberian sanksi Ketika SKPD melakukan kelalaian yang menyebabkan temuan material namun juga reward Ketika opini WTP dapat dipertahankan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur dalam meraih dan mempertahankan kan opini WTP antara lain membuat prosedur dan kebijakan baru guna mengefektifkan fungsi dalam pemerintahan sehingga hal-hal yang menjadi kendala pada tahun-tahun sebelumnya dapat diatasi. Meningkatkan sarana dan kapasitas SDM, melakukan rekonsiliasi dan monitoring terkait data laporan keuangan dan SPJ secara berkala baik oleh atasan masing-masing SKPD ataupun inspektorat selaku pengawas internal.

Makna pencapaian opini WTP walaupun dimaknai sebagai beban yang cukup berat oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat selama proses penyusunan laporan keuangan dan proses audit oleh BPK, namun disikapi dengan penuh tanggung jawab guna terciptanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari segi kualitas SDM khususnya bagian pengelola aset dan sub bidang akuntansi dan pelaporan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan fungsi ataupun perannya. Misalnya pada pengelola aset kekurangan SDM dengan latar belakang Pendidikan IT dimana dengan sistem pelaporan dan berbasis teknologi menuntut SDM dengan keahlian teknologi informasi. Di sub bidang akuntansi penambahan SDM dengan latar belakang pendidikan akuntansi sangat diperlukan mengingat hanya ada 1 orang SDM dengan latar belakang Pendidikan akuntansi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan kualitas SDM dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikannya sehingga fungsinya dapat berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki kendala dari segi kuantitas SDM. Hal ini terjadi pada salah satu unit kerja yakni inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki SDM auditor 15 dengan obyek pemeriksaan yang cukup banyak, dari 15 auditor hanya 5 yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi, Hal ini tentunya tidak sebanding dengan beban pekerjaannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Tanjung Jabung Timur perlu menambah karyawan pada bagian fungsi pengawasan sehingga dalam menjalankan fungsinya lebih optimal.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu komponen penting dalam proses pencapaian opini WTP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah tindak lanjut Inspektorat dalam pemenuhan rekomendasi BPK terhadap temuan pemeriksaan. Peneliti hanya memperoleh informasi dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen, pada penelitian ini peneliti karena keterbatasan waktu tidak melakukan observasi lapangan terhadap proses tindak lanjut temuan untuk melihat pada prakteknya bagaimana proses tindak lanjut yang dilakukan inspektorat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan melakukan observasi lapangan atas proses tindak lanjut temuan.
2. Perolehan Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak lepas dari peran Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan wawancara kepada BPKP terkait peran BPKP yang kerap berhubungan langsung dengan inspektorat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan peranan dari BPKP.
3. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai objek pemeriksaan BPK untuk memperoleh opini tentunya dalam pelaksanaannya melewati proses perencanaan dan penganggaran. Dalam penelitian ini peneliti tidak menyajikan proses awal yakni perencanaan dan penganggaran dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyajikan secara utuh siklus pengelolaan keuangan negara.

### DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015*. BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016*. BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017*. BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018*. BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif Studi Multidisiplin Keilmuan dengan Nvivo 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Corbin, S. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, W. (2017). *Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. 2(2), 178–186.
- Kamayanti Ari. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudamakin, A. (2017). *Analisis Proses Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada Kabupaten Sumba Timur)*. repository.ugm.ac.id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. (2013). *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. (2017a). *Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. (2017b). *Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Pernyataan Standar AKuntansi Pemerintahan (IPSAP) nomor 2. (n.d.). *Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Kas Umum Daerah*.
- Sougi, T. (2018). *Analisis Temuan Pemeriksaan Bpk-Ri Atas Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun Anggaran 2014 – 2016*. 34–40. JAKU universitas Jambi
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. (2004). *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. (2006). *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). *Tentang Keuangan Negara*.
- Vivin, et al. (2013). Persepsi Pengguna Laporan Keuangan atas Opini Audit. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2 (2), 93–103.